

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*The Rule Of Law/Rechtsstaat*). Hal ini berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Pasal di atas bermakna, bahwa Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas Hukum, di mana Hukum merupakan urat nadi yang menjadi titik tolak segala kebijakan pemerintah terhadap warga negaranya.

Jimly Asshidiqie, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menganut paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum.<sup>2</sup> Hukum merupakan panglima yang tertinggi, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>3</sup> Dengan kata lain, sebagai negara hukum negara Indonesia akan menjamin setiap orang berdasarkan kepada hukum untuk melangsungkan perihal kehidupannya sesuai dengan tujuan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> UUD 1945.Pdf. Hlm 2

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007, hlm. 149.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Menurut Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, walaupun tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Lebih lanjut Dardji dan Shidarta menjelaskan idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya, contohnya seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar (1989: 4) dengan mengatakan, “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu”. Lihat Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 155-156.

Berdasarkan hal tersebut, Negara menjamin kedudukan atas hak dan kewajiban seluruh warga negaranya berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini di nyatakan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>5</sup>

Pasal tersebut di atas bermakna bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban serta persamaan kedudukan di depan hukum. Hal ini di karenakan hukum merupakan landasan negara dalam mengatur sistem pemerintahan dan seluruh warga negaranya.

Menurut L.M. Friedman, sistem hukum tersusun dari sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>6</sup> Substansi tentang hukum berisikan tentang aspek - aspek pengaturan hukum atau peraturan tentang perundang-undangan. Struktur hukum merupakan aparatur, sarana dan prasarana hukum itu sendiri, di mana aparatur hukum sebagai pelaksana dalam hal penegakkan hukum. Sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Untuk mewujudkan dan menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum, ketiga unsur sistem hukum di atas amat penting. Di karenakan sistem yang satu tidak dapat lepas pengaruhnya terhadap sistem hukum yang lainnya. Dimana peraturan hukum dan norma hukum yang berlaku harus di iringi oleh

<sup>5</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*.Pdf. Op. Cit Hlm 18

<sup>6</sup> L.M. Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundatio, 1975, hlm. 5.

aparatur hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan serta pondasi utama penegakkan hukum positif yang berlaku, serta di iringi pula oleh pola pikir masyarakat yang taat hukum, agar terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum yang baik sehingga dapat terwujudnya keadilan.

Hukum positif dalam hal ini berupa konstitusi atau undang-undang dasar tahun 1945 adalah sebagai acuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan bukan hanya mengatur tatacara bermasyarakat serta menegakkan kewenangan serta kebijakan pemerintah, namun juga bertujuan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah serta aparatur penegak hukum itu sendiri. Tujuan pembatasan kekuasaan penguasa oleh konstitusi atau undang-undang pada dasarnya diarahkan pada dua macam tujuan yang satu berhubungan dengan yang lain. Pertama, pembatasan kekuasaan penguasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara, sebab, jika kekuasaan penguasa tidak secara tegas diatur atau dibatasi dalam konstitusi atau undang-undang akan timbul godaan dan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi penguasa. Kedua, jika kekuasaan penguasa dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar diharapkan penguasa akan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jika penguasa menjalankan wewenangnya sesuai dengan konstitusi atau undang-undang diharapkan rakyat akan terhindar dari sewenang-wenang penguasa.



Pada akhirnya jaminan terhadap hak-hak rakyat atau warga negara akan dapat diwujudkan.<sup>7</sup>

Sebagai Negara yang berlandaskan dan menjunjung tinggi Hukum, tentunya Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal yang patut diutamakan dalam suatu Negara Hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>8</sup>

Hal ini dikarenakan setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>9</sup>

Indonesia dalam setiap kebijakan pemerintahnya memiliki lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah yang menjalankan setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah tersebut di batasi oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang mengatur secara khusus mengenai tugas dan kewenangan badan-badan pemerintah tersebut. Agar tidak terjadi kesewenangan oleh aparat-aparat lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan tersebut.

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki tiga lembaga Negara utama yang menjadi pondasi utama pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas, dan

<sup>7</sup> Hotma P. Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ata Prints, 2007, hlm. 70.

<sup>8</sup> UUD 1945.Pdf. Op. Cit. Hlm 19

<sup>9</sup> *Ibid.*



kewenangan pemerintahan itu sendiri, yaitu badan Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif, dimana kedudukan ketiganya sama, sehingga antar badan Negara dapat saling mengawasi dan menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan fungsinya, tugas dan kewenangannya.

Keberadaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dijadikan sebagai konstitusi tertulis dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Semua kegiatan ketatanegaraan Indonesia bersumber dan didasarkan kepada UUD45, sehingga tidak ada tindakan dan perbuatan dalam menjalankan ketatanegaraan atau kekuasaan negara yang menyimpang dari UUD45. Secara lebih luas peranan UUD45 bersifat membatasi dan mengatur perilaku setiap badan negara, baik berlaku badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Buruh atau tenaga kerja adalah setiap warga Negara yang bekerja pada suatu badan hukum dimana buruh atau tenaga kerja tersebut di beri upah hasil kerja (Upah kerja atau gaji) dimana hal tersebut di atur berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”<sup>11</sup>. Ketentuan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang

<sup>10</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/04/uu-perburuhan/>

<sup>11</sup> Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pdf. Hlm 1

Ketenagakerjaan yang berbunyi, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”<sup>12</sup>

Persoalan mengenai buruh atau tenaga kerja sudah terjadi sejak lama dimana sejarah mencantumkan bahwa persoalan mengenai sengketa antara buruh sudah terjadi sejak jaman pra-imperialisme.<sup>13</sup> Adanya kesenjangan antara buruh atau tenaga kerja dengan majikannya bukanlah masalah baru dalam dunia kerja di Indonesia. Permasalahan besarnya upah yang layak, jam kerja yang kondusif serta hal-hal lain yang dapat menjadi awal munculnya sengketa antara buruh dengan majikannya pun bukanlah hal baru juga dalam dunia kerja. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman era globalisasi sudah pasti tentu di perlukan adanya perkembangan penyelesaian sengketa perburuhan. Dimana tentunya perlu adanya jalan penyelesaian yang di anggap adil baik bagi buruh maupun majikannya, agar tiada satupun pihak yang merasa di rugikan.

Indonesia merupakan negara hukum yang bertitik tolak pada aturan hukum positif yang berlaku (undang-undang) dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berkenaan dengan kepentingan setiap warga negaranya serta kepentingan pemerintahan itu sendiri. Permasalahan tata cara ketenagakerjaan hingga penyelesaian sengketa antara buruh dan majikannya pun tertuang pada aturan hukum positif yang berlaku melalui Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 22 yang berbunyi, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 2

<sup>13</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/beberapa-cara-penyelesaian-sengketa-perburuhan/>

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dan mengenai Permasalahan tata cara ketenagakerjaan hingga penyelesaian sengketa antara buruh dan majikannya mengenai status tenaga kerja atau buruh yang system kontraknya merupakan perjanjian harian lepas tertuang pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004 pada pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang berbunyi, pada ayat 1 (satu) untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Sedangkan pada ayat 2 (dua) berbunyi, perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan bunyi pada ayat 3 (ketiga) adalah, dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu).<sup>14</sup>

Bertitik tolak pada uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara analisis yuridis normative, dimana judul yang di angkat

---

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004. Pdf



dalam penelitian yang akan di tuangkan dalam karya tulis yang di buat oleh penulis yang berjudul : **PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERDASARKAN PASAL 10 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 100 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 159/G/2010/PHI/PN.BDG.)**



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan pemutusan kontrak kerja oleh direktur PT Indomitra Sedaya terhadap tenaga kerja harian lepas yang telah bekerja selama tujuh tahun pada PT. Indomitra Sedaya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Apakah tindakan direktur PT. Indomitra Sedaya tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana?
3. Apakah tindakan direktur PT. Indomitra Sedaya tersebut dapat didakwa berdasarkan pasal 1365 BW? (perbuatan melawan hukum)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok. Adapun 3 (tiga) tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemutusan kontrak kerja oleh direktur PT Indomitra Sedaya terhadap tenaga kerja harian lepas yang telah bekerja selama tujuh tahun pada PT. Indomitra Sedaya dapat di katakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) buruh atau tenaga kerja yang PHK atau tidak.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang di lakukan oleh direktur PT. Indomitra Sedaya terhadap buruh atau tenaga kerja yang di PHK.
3. Untuk mengetahui apakah direktur PT. Indomitra Sedaya dapat di gugat ganti rugi karena tindakannya dapat di kategorikan sebagai sebagai

perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 BW, sehingga dapat di lakukan dakwaan terhadap direktur tersebut karena melanggar ketentuan pasal 10 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomo100 tahun 2004.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara serta Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan Hukum Perburuhan serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA).



## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### 1.1 Teori Negara Hukum

Sejak zaman Yunani kuno sampai abad ke-20 (dua puluh) hingga kini Konsepsi (doktrin) negara hukum atau asas negara hukum merupakan asas yang lahir dari proses perkembangan sejarah yang berlangsung cukup lama. Pertama sekali negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan menghasilkan 3 (tiga) karya yaitu *Politeia (The Republica)* yang ditulisnya ketika ia masih muda, *Politicos (The Stateman)*, dan *Nomoi (The Law)*.<sup>15</sup>

Setelah Aristoteles mengemukakan tentang negara hukum kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang mengatakan bahwa negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>16</sup>

Gagasan tentang negara hukum timbul kembali pada abad ke-17 dan 18 adalah reaksi atas penguasa (raja) yang memiliki kekuasaan absolut (mutlak) yang bertindak sewenang-wenang di Eropa. Keadaan tersebut mendorong para ahli hukum seperti John Locke, Montesquieu, J.J. Rosseau mengemukakan bahwa kekuasaan raja (penguasa) perlu dibatasi dengan atau berdasarkan hukum.

<sup>15</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995, hlm. 19.

<sup>16</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (et. al), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1983, hlm. 153.

Konsepsi atau gagasan negara hukum yang mula-mula berkembang di benua Eropa adalah negara hukum Penjaga Malam (*Nacht Wachterstaat*). Disebut sebagai negara Penjaga Malam karena negara hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman semata-mata. Untuk urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat merupakan urusan masing-masing individu. Konsepsi negara hukum formal dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Metaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*. Konsep ini juga dinamakan negara hukum liberal karena didukung oleh orang-orang kaya dan pandai yang disebut sebagai kaum Borjuis Liberal. Kaum borjuis liberal hanya ingin agar hak-hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu dan tidak dirugikan, konkretnya agar penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan kepada golongan Borjuis Liberal dan negara jangan turut campur.

Asas penyelenggaraan perekonomian dalam negara hukum liberal adalah berasaskan pada persaingan bebas *laisse faire, laissez passer* (siapa kuat dia yang menang). Kepentingan masyarakat tidak usah diperhatikan yang penting mereka (kaum liberal) mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Negara hukum penjaga malam atau hukum liberal memiliki dua unsur yang penting, yaitu Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Pemisahan kekuasaan.<sup>17</sup>

Konsepsi negara hukum liberal ternyata hanya menguntungkan golongan tertentu saja yakni golongan masyarakat yang menguasai bidang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

perekonomian (borjuis liberal). Negara hanya menjaga ketertiban saja dan inilah yang justru menjadi kelemahan gagasan negara hukum liberal. Sebab kebebasan tersebut mengakibatkan semakin banyak dan ketara jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan sedangkan kaum borjuis liberal semakin kaya.

Konsepsi negara hukum liberal yang dianggap telah gagal mendorong lahirnya konsepsi negara hukum formal yang dianggap lebih baik. Negara hukum formal sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl ada 4 (empat) unsur, sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- b. Pemisahan kekuasaan,
- c. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan undang-undang dan,
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>18</sup>

Sesuai dengan keempat unsur utama Negara Hukum Formal yang dikemukakan Sthal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.

Salah satu kelemahan dari negara hukum formal adalah sifat legalitas yang kaku. Prinsip legalitas dalam konsepsi negara hukum formal menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas undang-undang. Sebagai contoh apabila dalam anggaran belanja negara

---

<sup>18</sup>*Ibid.*



yang telah disetujui oleh rakyat (melalui badan legislatif) terdapat pos anggaran pengaspalan jalan raya, sedangkan yang terjadi pada waktu itu gempa yang menyebabkan runtuhnya jembatan, dalam hal ini pemerintah tidak boleh mengalihkan sebagian dana pengaspalan jalan untuk perbaikan jembatan. Sebab tindakan pengalihan anggaran itu *onwetmatig*. Meskipun pengalihan anggaran itu sangat berguna dan diperlukan demi kepentingan umum.

Negara Hukum Formal yang mempunyai kelemahan menonjol dalam sifat legalitasnya yang kaku merupakan kendala bagi negara untuk melaksanakan tugasnya saat menghadapi keadaan-keadaan baru yang belum diatur dalam undang-undang namun sifatnya harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Kelemahan ini mendorong lahirnya konsepsi negara hukum material atau negara hukum sosial.

Perkembangan konsepsi negara hukum formal menjadi negara hukum material didorong oleh perkembangan tugas-tugas pemerintah yang semakin kompleks dan luas terutama dalam masalah sosial dan ekonomi. Perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau diatur secara formal berdasarkan asas legalitas.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pembentuk undang-undang (Badan Legislatif yang merupakan *original legislator*) perlu mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah sebagai *delegated legislator*) untuk membuat peraturan pelaksana. Pemerintah pun perlu diberi kewenangan untuk membuat kebijakan atas inisiatif sendiri (*freies ermenssen*) yang akan

---

<sup>19</sup>Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 53.

memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini hampir sama maknanya dengan pendapat Burkens bahwa hukum itu memiliki fungsi dalam 2 (dua) hal yaitu:

- a. Sebagai dasar kekuasaan negara, dan;
- b. Sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara<sup>20</sup>

Dalam negara hukum, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak didasarkan pada kekuasaan melainkan hubungan yang bersifat sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum. Akan tetapi, ada faktor penting yang tidak dapat diabaikan selama negara hukum itu bukan mesin menurut Soediman Kartohadipradjo, segala tindakan negara dalam praktek sehari-hari dilakukan oleh manusia pula.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa negara hukum bertujuan menjamin ketertiban dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfairstaats*). Oleh karena itu, Negara Indonesia sebagai penganut negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD45.

Pasal 1 Ayat 3 (tiga) UUD 1945, mempertegas konsistensi negara Indonesia menganut teori negara hukum (*The Rule Of Law/Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, bahwa dengan dirumuskan Pasal 1 ayat 3 (tiga) UUD45, menunjukkan bangsa Indonesia menganut paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum.<sup>21</sup> Hukum merupakan

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>21</sup>Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hlm. 149.

panglima yang tertinggi, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>22</sup> Dengan kata lain, sebagai negara hukum negara Indonesia akan menjamin setiap orang berdasarkan kepada hukum untuk melangsungkan perihal kehidupannya sesuai dengan tujuan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut tidak seorangpun dapat berbuat sesuka hatinya tanpa berdasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan pengertian lain, tidak satu orangpun, baik penguasa negara, pemerintah, kelompok, dan orang perseorangan dapat mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan hukum, karena hukum didasarkan pada kepentingan umum. Sebagaimana dapat diketahui dari pengertian negara hukum yang pertama sekali dikemukakan oleh filsuf Yunani bernama Aristoteles.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Menurut Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, walaupun tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Lebih lanjut Dardji dan Shidarta menjelaskan idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya, contohnya seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar (1989: 4) dengan mengatakan, “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu”. Lihat Dardji Darmodiharjo dan Shidarta (et. al), *Op. Cit.*, hlm. 155-156.

<sup>24</sup>Menurut Aristoteles bahwa negara hukum itu muncul dari suatu negara polis yang terletak di suatu kota kecil di Yunani disebut Kota Athena. Dimana negara polis ini telah dijalankan berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sebagai dasar dari keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara. Sehingga negara hukum mempunyai tujuan untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik di bidang kesejahteraan rakyat maupun keamanan dan ketertiban. Lihat Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim (et. al), *Op. Cit.*, hlm. 153.



Sesuai dengan uraian-uraian di atas dapat diketahui dari fungsi dan tujuannya, UUD45 sebagai payung kepada semua hukum yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan keorganisasian negara. Sebagai negara hukum, berarti di negara Indonesia hukum mempunyai arti penting terutama dalam semua segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantara pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum atau undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Salah satu dari sekian banyak segi-segi kehidupan masyarakat yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah adalah bidang pekerjaan. Di dalam Pasal 27 Ayat 2 (dua) dan Pasal 28D Ayat 2 (dua) UUD45 telah mengamanahkan penyelenggaraan pengaturan dan perlindungan hak warga negara dan hak setiap orang dalam pekerjaan. Hanya saja maksud Pasal 27 Ayat 2 (dua) lebih mengarahkan kepada perlindungan "hak warga negara Indonesia" dalam pekerjaan, sedangkan Pasal 28D Ayat 2 (dua) lebih mengarah kepada perlindungan kepada "hak asasi manusia" dalam pekerjaan (maksudnya tidak hanya terbatas kepada warga negara tetapi bisa kepada siapa saja di luar warga negara Indonesia).

Dari kedua Pasal 27 Ayat 2 (dua) dan Pasal 28D Ayat 2 (dua) menunjukkan bahwa UUD45 menjamin dan melindungi setiap warga negara dan HAM setiap orang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk merealisasikan pengaturan dan perlindungan kepada warga negara dan HAM setiap orang berkaitan dengan pekerjaan, pemerintah telah

mengundangkan berbagai perundang-undangan ketenagakerjaan, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada prakteknya hak-hak pekerja atau buruh belum terlindungi disebabkan baik karena ketidakjelasan norma hukum yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun akibat ketidakjelasan dalam putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perburuhan atau perselisihan perburuhan, sehingga keberadaan UU Nomor 13 Tahun 2003 belum memberikan fungsi perundang-undangan pada umumnya sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan.

Menurut Bagir Manan, fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu: Fungsi Internal dan Fungsi Eksternal.<sup>25</sup>

1. Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Fungsi penciptaan hukum. Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui

---

<sup>25</sup>Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Makalah, 1993, hlm. 47.

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 17-20.

putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena, sistem hukum Indonesia (sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda) lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*), politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrument utama. Bandingkan dengan hukum yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrument dapat disusun secara berencana atau dapat direncanakan.



b. Fungsi pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrument efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Termasuk juga memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru, di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal

tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat *rigid* terhadap perubahan.<sup>27</sup>

- c. Fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving*, *uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven*, *written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu, jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern, yaitu adanya hubungan “harmonisasi” antara *berbagai* peraturan perundang-undangan; dan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Bahasa

---

<sup>27</sup>Bagir Manan, *Ibid.*, hlm. 6.

hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara tetap karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum. Apabila melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan akan kehilangan sifat kepastian hukumnya dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

2). Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan dan fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Fungsi perubahan, yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as social engineering*). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

---

<sup>28</sup>Bagir Manan, *Ibid.*, hlm. 21-22.



- b. Fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

## 1.2 Teori Jenis Kejahatan

Setiap kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi.<sup>29</sup> Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti : para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain.

<sup>29</sup> <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis.html>

Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Apabila kita membicarakan mengenai kejahatan termasuk sebab-sebabnya tentu tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi. Menurut Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya Dalam Teori kriminologi sendiri kejahatan terbagi ke dalam tiga perspektif yaitu:

- a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis dan Psikologis
- b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis
- c. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lain<sup>30</sup>

Secara umum kejahatan sebagai kebalikan dari kekuasaan, yang artinya semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan kejahatan dan demikian juga sebaliknya. Orientasi sosio-psikologis teori ini pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dari perilaku kolektif.<sup>31</sup> Dalam pandangan teori ini bahwa manusia secara terus menerus berlaku untuk terlibat dalam kelompoknya dengan arti lain hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi suatu

<sup>30</sup> <http://ehsablog.com/teori-hukum-kriminologi-dan-hukum-pidana.html>

<sup>31</sup> <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis.html>. Op. Cit

perilaku yang kolektif. Dalam perkembangan lebih lanjut aliran ini melahirkan teori “kriminologi Marxis” dengan dasar 3 hal utama yaitu, bahwa perbedaan bekerjanya hukum merupakan pencerminan dari kepentingan *rulling class*, kejahatan merupakan akibat dari proses produksi dalam masyarakat, dan hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari *rulling class*.<sup>32</sup> Perkembangan kejahatan tidak terlepas dari perkembangan zaman yang juga akan melahirkan kemajuan teknologi. Di sini orang tidak akan cepat merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya, walaupun sebenarnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup, tetapi tetap saja melakukan kejahatan. Munculnya teknologi canggih sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru pula sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan yang konvensional saja.

Teori Kriminologi membahas secara umum teori kriminologi di mana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Dimana kondisi-kondisi sosial tertentu di dalam masyarakat dihubungkan dengan kemungkinan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, kondisi-kondisi sosial tadi memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> <http://www.hukumhindu.com/2011/07/teori-paradigma-studi-kejahatan/>

<sup>33</sup> <http://www.scribd.com/doc/44275834/TEORI-KEJAHATAN-revisi>



Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku di masyarakat.<sup>34</sup> Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Dengan dilanggarnya fondasi ketertiban masyarakat tersebut maka tentunya perbuatan tersebut adalah jahat. Pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana dan bahwa kita akan dapat menghilangkan seluruh kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum (undang-undang) pidana adalah logomachy.

Batasan dan kondisi kejahatan di dalam masyarakat mempunyai sifat relatif. Relativisme kejahatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni adanya ketertinggalan hukum karena perubahan nilai sosial dan perkembangan perilaku masyarakat, adanya perbedaan pendekatan tentang kejahatan di mana di satu sisi memakai pendekatan legal dan di sisi lain memakai pendekatan moral serta adanya relativisme dilihat dari sisi kuantitas kejahatan.<sup>35</sup>

Batasan yang sangat sederhana tentang penjahat, yaitu “seseorang yang melakukan kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.<sup>36</sup>

Perkembangan pemikiran dalam peradilan pidana juga lebih banyak mengedepankan masalah hak-hak pelaku kejahatan. Schafer dalam bukunya *Victimology: The Victim and His Criminal* (Korban dan si Pelaku Kriminal) mengembangkan konsep yang juga memposisikan korban sebagai pihak yang juga harus menanggung kesalahan dalam konteks terjadinya kejahatan. Banyak viktimisasi yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan.

### 1.3 Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut, Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.<sup>37</sup>

Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan

<sup>36</sup> <http://www.hukumhindu.com/2011/07/teori-paradigma-studi-kejahatan/>

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Pdf

hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- b. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
  - 1) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - 2) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.<sup>38</sup>

Maka dari itu, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Kesalahan dengan hal ini, terdapat dua kemungkinan, yaitu, orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan

<sup>38</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/>



terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja atau Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.<sup>39</sup>

c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh,
- 2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- 1) Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat),
- 2) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>41</sup>

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

- a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW,
- b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW,
- c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW.

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal penulisan ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada proposal penulisan yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:



- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>42</sup>
- b. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>43</sup>
- c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>44</sup>
- d. Pengusaha adalah: 1). Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 2). Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 3). Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>45</sup>
- e. Perusahaan adalah: 1). Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 2). Usaha-usaha sosial dan usaha-

---

<sup>42</sup> UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.Pdf. Op. Cit. Hlm. 1

<sup>43</sup> Ibid. Hlm. 2

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

- usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>46</sup>
- f. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>47</sup>
- g. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>48</sup>
- h. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>49</sup>
- i. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

- j. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.<sup>51</sup>
- k. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>52</sup>
- l. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.<sup>53</sup>
- m. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm. 3

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*



- n. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>55</sup>
- o. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>56</sup>
- p. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.<sup>57</sup>
- q. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.<sup>58</sup>

---

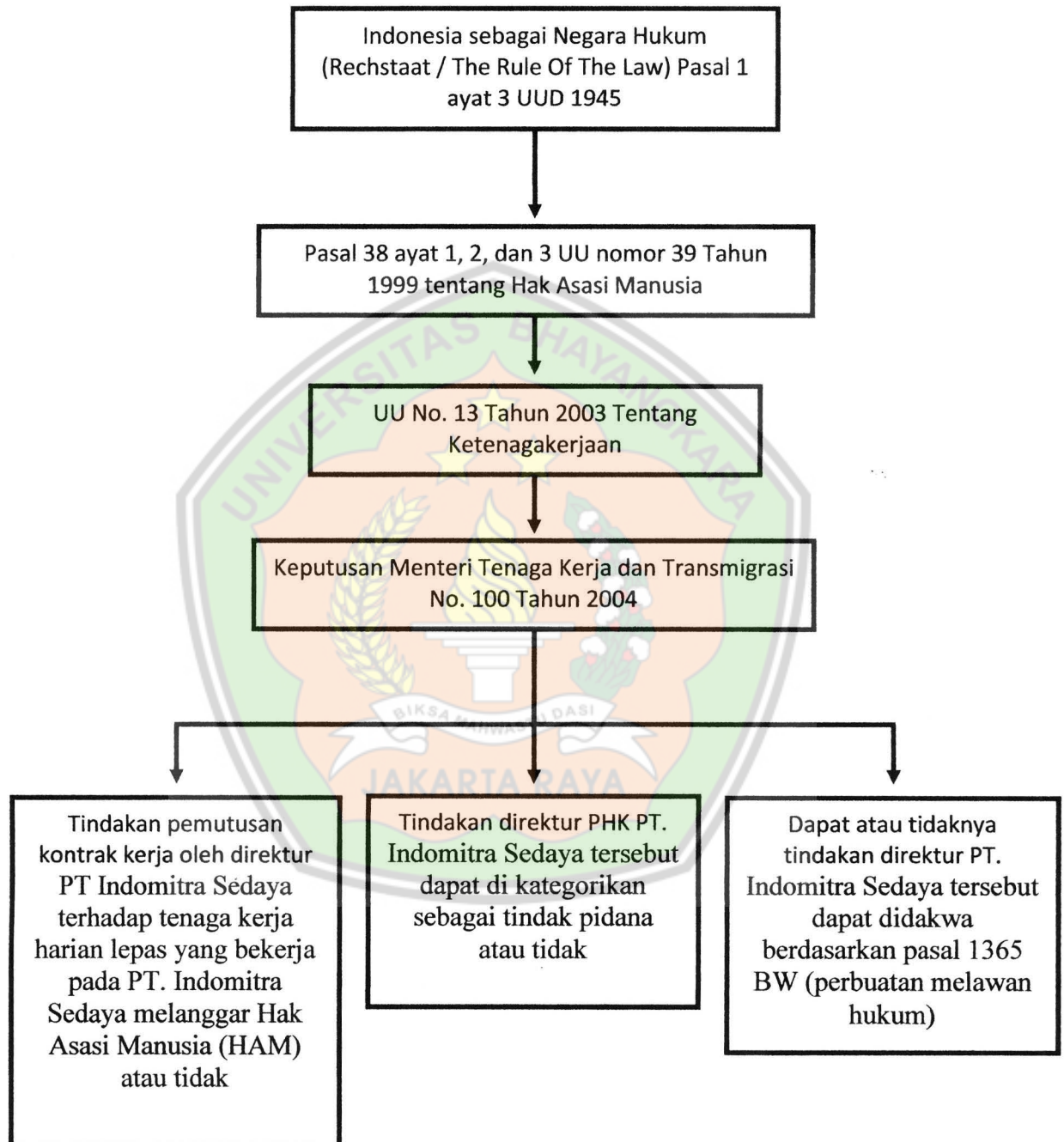
<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *KepMentrans Nomor 100/Men/2004.Pdf*

<sup>58</sup> *Ibid.*

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Metode penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.<sup>59</sup> Data sekunder adalah yang sudah siap pakai,<sup>60</sup> contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan mengakses situs-situs internet.

---

<sup>59</sup>Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm 76.

<sup>60</sup>*Ibid.*



## 2. Pendekatan

Adapun pendekatan dilakukan dalam menulis skripsi penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.<sup>61</sup>

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.<sup>62</sup>

## 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang

<sup>61</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>63</sup> Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>64</sup>

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.<sup>65</sup> Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 66.

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33.

<sup>65</sup>Hotma P. Sibuea, *Op.Cit*, hlm. 66.

penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.<sup>66</sup> Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).<sup>67</sup> Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat di dalam kamus bahasa tiap negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*judge*” dan bahasa Belanda dengan kata “*rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 69.



langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>68</sup> Akan tetapi, dilakukan dimana data keputakaan itu berada.

Data keputakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada dimana saja sehingga pengalihan data keputakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data keputakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data keputakaan tersebut.

##### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisis hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>69</sup>

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia, oleh karena itu, untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm 27.

hakekatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>70</sup> Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.<sup>71</sup> Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.<sup>72</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>73</sup> Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>74</sup> Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>74</sup>*Ibid.*

atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).<sup>75</sup>

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut.<sup>76</sup> Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematiskan atau disusun secara sistematis. Sistematiskan hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>77</sup> Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

<sup>77</sup>*Ibid.*



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan secara teratur dan menyeluruh isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab :

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan dan Manfaat Penelitian, D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran, E. Metode Penelitian dan F. Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang, A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perburuhan, B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hukum Perburuhan

Bab III : Hasil Penelitian yang menguraikan tentang, A. Hal-Hal yang Mempengaruhi Sengketa Antara Buruh dengan Badan Hukum Tempat Buruh Bekerja, B. Peranan Peradilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perburuhan

Bab IV : Pembahasan yang menguraikan tentang, A. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Harian Lepas, B. Analisa dan Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Perkara No. 159/G/2010/PHI/PN/.BDG

Bab V : Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran